

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM DISKRIMINASI GENDER DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN

Oleh

MONICA VINY ANGRAINI

Diskriminasi gender masih menjadi salah satu permasalahan yang cukup serius di Indonesia. Dimana hingga kini masih ditemukan adanya perlakuan diskriminasi gender di Indonesia terutama dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, contoh salah satunya yaitu kebidanan. Dapat di lihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dimana masih belum terdapat kesetaraan gender di dalamnya. Akibat dari tidak adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tersebut dapat menyebabkan terjadinya stereotip dan bias gender sehingga dapat menimbulkan rasa kesenjangan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak (laki-laki/ perempuan). Maka dengan adanya permasalahan tersebut muncullah suatu rumusan masalah dalam penelitian ini seperti mengapa dalam Undang-Undang Kebidanan hanya mengutamakan perempuan yang dapat membantu persalinan dan bagaimana penegakan hukum dalam mengatasi diskriminasi gender tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dan empiris, dimana penulis akan melakukan observasi langsung ke 6 desa yang terdapat di Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini dilakukan untuk dapat menjawab rumusan masalah dalam penulisan ini. Secara filosofis hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Kebidanan dibentuk berdasarkan sejarah dan budaya yang berlaku di Indonesia. Sosial-kultural menjadi salah satu faktor profesi bidan hanya seorang perempuan serta hal tersebut juga telah didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan membentuk peraturan tentang kebidanan yaitu Undang-Undang Kebidanan.

Kata kunci: *diskriminasi gender, kesetaraan gender, undang-undang kebidanan.*

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT OF GENDER DISCRIMINATION IN LAW NUMBER 4 OF 2019 CONCERNING MIDWIFERY

By

MONICA VINY ANGRAINI

Gender discrimination is still one of the most serious problems in Indonesia. Where there is still gender discrimination in Indonesia, especially in education and employment, one example is Midwifery. It can be seen in Law Number 4 of 2019 on Midwifery, where there is still no gender equality. The absence of equality between men and women can lead to stereotypes and gender bias, resulting in a sense of inequality and injustice felt by one party (male or female). So with this problem came a formulation of problems in this study, such as why the Midwifery Act only prioritizes women who can help with childbirth and how law enforcement can deal with gender discrimination. The type of research used in this study is normative and empirical law research, where the author will conduct direct observation of six villages in Marga Tiga District, East Lampung Regency. This study was conducted to answer the problem formulation in this writing. Philosophically, the results of this study suggest that the Law of Midwifery was established based on the history and culture prevailing in Indonesia. Socio-cultural is one of the factors of the midwife's profession, only a woman, and this has also been supported by the People's Representative Council (DPR) by establishing a regulation on Midwifery, namely the Midwifery Law.

Keywords: gender discrimination, gender equality, midwifery law.